

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan tepat sasaran. (Segah & Kaharap, 2022)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, yaitu kewenangan presiden atas keuangan negara dilimpahkan kepada gubernur, walikota, atau bupati yang membawahi daerah untuk mengawasi keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan mandiri atas daerah aktiva. Sebagai bagian dari kewenangan pemerintah daerah, bupati, gubernur, atau walikota membidangi pengelolaan keuangan daerah, yang berdampak pada undang-undang pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja menunjukkan adanya akuntabilitas kinerja yang terdapat keterkaitan antara sasaran strategis yang ingin dicapai dengan jumlah dana yang dialokasikan maka dapat diasumsikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik mempunyai pengaruh terhadap kinerja suatu instansi atau organisasi. Pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan laporan keuangan yang baik pula, hal ini dapat mengindikasikan

kinerja yang baik pula pada suatu instansi atau organisasi. (Abdul dalam Hidayat, 2015)

Pengelolaan keuangan daerah memiliki dimensi-dimensi yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi yaitu; 1) Akuntabilitas, menurut Mardiasmo (2016), akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban administratif, tetapi juga mencakup aspek moral dan etis dalam pengelolaan anggaran. 2) Value for Money (VFM) merupakan konsep yang menekankan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran. Menurut Mahmudi (2019), *value for money* adalah suatu konsep dalam organisasi sektor publik yang mengacu pada penghargaan terhadap nilai uang. Pengukuran kinerja *value for money* berfokus pada penilaian terhadap ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dari suatu kegiatan, program, dan organisasi. 3) Kejujuran, menurut Soleh & Rochmansjah (2010), dalam mengelola keuangan publik merupakan dasar moral yang harus dipegang oleh setiap pengelola keuangan daerah. Kejujuran memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan dengan integritas dan tanpa adanya penyalahgunaan atau korupsi. 4) Transparansi merupakan dimensi penting lainnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Mahmudi (2016) dengan transparansi berarti adanya keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi, yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan, dengan ini pemerintah daerah dapat menghindari dugaan penyalahgunaan anggaran dan membangun kepercayaan publik. 5) Pengendalian, menurut Fara et al., (2018) lemahnya pengendalian intern dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan salah satu penyebab

terjadinya ketidakefisienan dan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintah daerah dan tentunya berdampak pada pemborosan anggaran dan keuangan daerah.

Kinerja organisasi pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh bagaimana keuangan daerah dikelola. Kinerja yang baik biasanya ditandai dengan pencapaian target pembangunan, peningkatan kualitas layanan publik, dan kepuasan masyarakat. Menurut Hidayat (2015), pengelolaan keuangan yang baik berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan keuangan daerah seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti korupsi, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, dan keterbatasan sistem pengawasan. Syarifudin (2022), mengemukakan bahwa masalah-masalah tersebut dapat menghambat pencapaian kinerja yang optimal dan perlu penanganan serius untuk menciptakan tata kelola yang baik.

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola sumber daya alam berupa hutan dan lingkungan hidup di wilayahnya. Efektivitas dari pengelolaan keuangan di dinas ini bukan hanya mempengaruhi keberlangsungan operasional sehari-hari, tetapi juga kinerja organisasi secara keseluruhan. Salah satu alat yang penting dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja serta pengelolaan keuangan di instansi pemerintah adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP menjadi sumber data yang kaya akan informasi mengenai capaian kinerja, efisiensi penggunaan anggaran, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Data dari LAKIP dapat

memberikan gambaran yang mendalam mengenai sejauh mana kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan daerah telah berdampak terhadap pencapaian tujuan strategis dinas, seperti pengelolaan kelestarian hutan, pengendalian perubahan iklim, dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Kehutanan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKIP Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat khususnya tahun 2020-2022. Selanjutnya, kinerja program dihitung dengan membandingkan kinerja saat ini dengan kinerja tiga tahun yang ditargetkan, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2020	38.937.666.388	37.606.800.525	96.58%
2021	239.333.559.679	229.293.936.773	95.81%
2022	251.338.310.618	241.592.879.725	96,12%

Sumber: LKIP Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat (data diolah, 2023)

Tabel 1.1 menyajikan statistik yang menunjukkan bahwa realisasi anggaran program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat tidak sesuai dengan jumlah yang dianggarkan. Misalnya, besaran belanja daerah yang dianggarkan pada tahun 2020 anggaran belanja daerah sebesar Rp. 38.937.666.388 terealisasi Rp. 37.606.800.525 atau sebesar 96.58%, pada tahun 2021 anggaran belanja sebesar Rp. 239.333.559.679 terealisasi sebesar Rp. 229.293.936.773 atau sebesar 95.81%,

dan pada tahun 2022 realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 251.338.310.618 terealisasi sebesar Rp. 241.592.879.725 atau sebesar 96,12%. Terlihat bahwa tak ada satu pun persentase anggaran pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat yang mencapai pencapaian 100% dalam realisasi anggaran.

Tabel 1.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase peningkatan tutupan hutan	Persen	40,52	45,43%	112,11%
2.	Tingkat kerusakan hutan	Persen	0,8	0,59	126,26%
3.	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan	Persen	5	-6,9	-139,53%
4.	Persentase peningkatan Produksi Hasil Hutan	Persen	10	12,45	124,5%
5.	Persentase peningkatan penerimaan jasa lingkungan	Persen	0	-35,57	0
6.	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Persen	0	-	-

Sumber: LKIP Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Kehutanan tahun 2020 adalah sebesar 223,34% (Sangat Baik), yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran. Dari 6 Indikator sasaran strategis, sebanyak 3 indikator sasaran capaiannya “Sangat Baik”, dan 2 indikator sasaran capaiannya “Kurang”, serta 1 indikator tidak ada realisasi

(0). Indikator sasaran yang bernilai 0, disebabkan adanya revisi target setelah anggaran *direfocusing*.

**Tabel 1.3 Capaian Indikator Kinerja Utaman (IKU) Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2021**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Point	38,80	40,78	105,1%
2.	Persentase tutupan hutan	Persen	40,77	43,17	105,88%
3.	Persentase penurunan kerusakan hutan	Persen	0,7	0,1	186%
4.	Persentase peningkatan populasi tumbuhan dan satwa liar yang ditangkarkan	Persen	5	3,75	75%
5.	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	Persen	10	31,46	314,6%
6.	Persentase peningkatan penerimaan dari jasa lingkungan	Persen	10	-11,2	-112%

Sumber: LKIP Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa Dinas Kehutanan mencapai tingkat kinerja secara keseluruhan sebesar 112,43% (Sangat Baik) pada tahun 2021 yang diukur dari rata-rata persentase pencapaian target. Dari 6 Indikator sasaran strategis, sebanyak 4 indikator sasaran capaiannya “Sangat Baik” 1 indikator sasaran capaiannya “Sedang” 1 indikator sasaran capaiannya “Kurang”.

**Tabel 1.4 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Point	38,85	40,81	105,04
2.	Persentase tutupan hutan	Persen	41,02	41,19	100,41
3.	Persentase penurunan kerusakan hutan	Persen	0,6	0,19	168,33
4.	Persentase peningkatan populasi tumbuhan dan satwa liar yang ditangkarkan	Persen	5	21,88	437,60
5.	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	Persen	30	31,45	104,83
6.	Persentase peningkatan penerimaan dari jasa lingkungan	Persen	5	85,21	1.704,20
7.	Persentase Penanganan Lahan Kritis	Persen	4,0	4,99	124,75
8.	Penurunan Nilai Total Suspended Solid (TSS)	Mg/L	40,81	31,91	121,81
	Rata-rata Capaian				358,37%

Sumber: LKIP Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa rata-rata persentase pencapaian tujuan yang digunakan untuk menghitung total tingkat pencapaian kinerja Dinas Kehutanan tahun 2022 adalah sebesar 358,37% (Sangat Baik). Dari 8 Indikator sasaran strategis, seluruh sasaran capaiannya “Sangat Baik”.

Tabel 1.5 Keterangan Presentase

Presentase	Keterangan
$\geq 100\%$	Sangat Baik
80% - < 100%	Baik
55% - < 80%	Sedang
< 55%	Kurang

Sumber: LKIP Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, bahwa pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022 masih belum optimal. Dapat dilihat dari pengelolaan anggaran yang masih kurang maksimal, yaitu tidak semua target yang telah ditetapkan sebelumnya bisa terlaksana dan kurang menunjang pencapaian. Aspek lainnya yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) belum mencapai target. Beberapa program dan kegiatan yang telah direncanakan belum sepenuhnya terlaksana, serta dinilai kurang efektif dalam mendukung pencapaian target yang diharapkan.

Melihat masalah yang disebutkan di atas, peneliti tertarik untuk menulis penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Organisasi di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, yang dijadikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja organisasi di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat?
2. Seberapa besar pengaruh *value for money* dalam pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja organisasi di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat?
3. Seberapa besar pengaruh kejujuran dalam pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja organisasi di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat?
4. Seberapa besar pengaruh transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja organisasi di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat?
5. Seberapa besar pengaruh pengendalian dalam pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja organisasi di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat?
6. Seberapa besar pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja organisasi di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja organisasi di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *value for money* dalam pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja organisasi di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kejujuran dalam pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja organisasi di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja organisasi di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengendalian dalam pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja organisasi di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja organisasi di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat meningkatkan serta berfungsi sebagai acuan dalam ilmu Administrasi Publik yang secara khusus, mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja organisasi yang dimana kedua hal tersebut merupakan aspek penting dari keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Dalam rangka memperoleh pemahaman lebih tentang pengelolaan keuangan daerah dan untuk memenuhi salah satu prasyarat untuk Gelar Sarjana (S1), Jurusan Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

2) Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai panduan, parameter untuk penelitian lanjutan, dan sumber ide mengenai hubungan antara pengelolaan keuangan daerah dan kinerja organisasi, yang dapat menjadi dasar bagi penelitian-penelitian mendatang.

3) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menginformasikan masyarakat serta berfungsi sebagai bahan penilaian yang relevan untuk pengelolaan keuangan pemerintah daerah, dan khususnya bermanfaat bagi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

E. Kerangka Pemikiran

Pengelolaan keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Karianga (2017), pengelolaan keuangan daerah mencakup semua kegiatan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah. Kegiatan ini dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan jabatan dan kewenangan masing-masing,

sehingga memastikan tata kelola yang terstruktur dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah meliputi “segala hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah.”

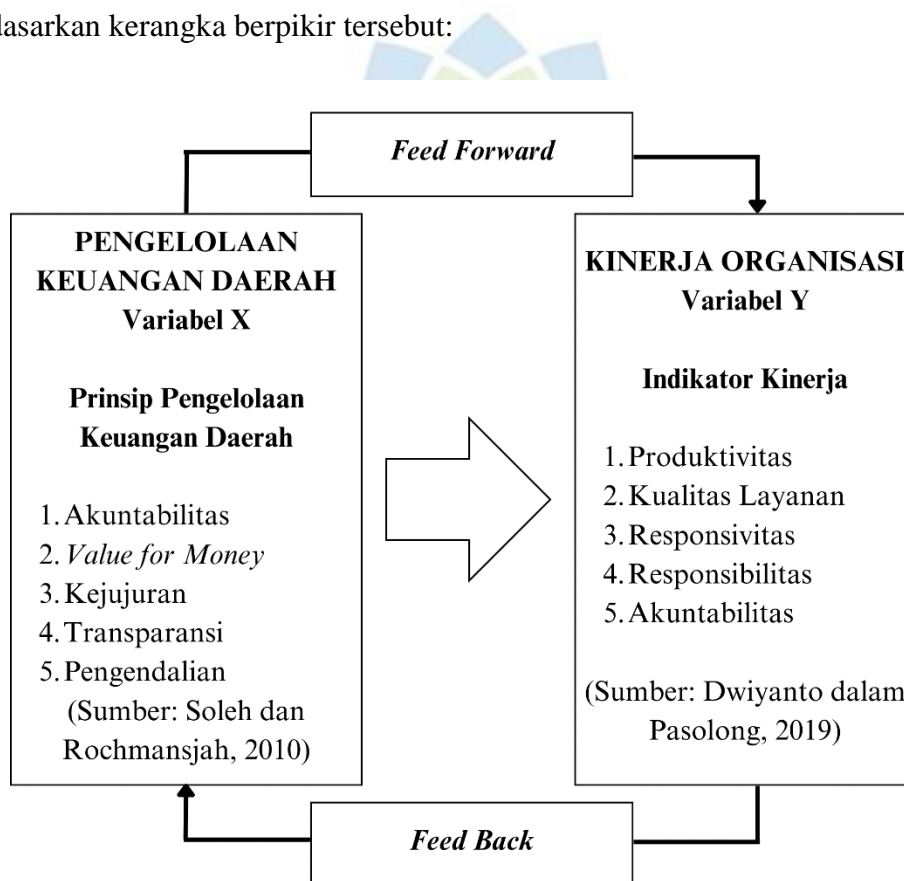
Lebih lanjut, Soleh dan Rochmansjah (2010) menyebutkan bahwa terdapat lima dimensi utama dalam konsep pengelolaan keuangan daerah, yaitu: akuntabilitas, *value for money*, kejujuran (*probity*), transparansi, dan pengendalian. Kelima dimensi ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara bertanggung jawab, efisien, dan berintegritas.

Terkait dengan kinerja organisasi, Pasolong (2019) mendefinisikan kinerja sebagai keseluruhan hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi, yang mencerminkan tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dwiyanto dalam Pasolong (2019) menambahkan bahwa kinerja birokrasi publik dapat dinilai melalui sejumlah indikator, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Indikator-indikator ini berfungsi sebagai alat ukur untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan keuangan daerah dan kinerja organisasi dengan pendekatan kuantitatif. Teori dan konsep yang telah dijelaskan akan digunakan sebagai landasan empiris

dalam pengujian teoritis. Penelitian ini difokuskan pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, dengan harapan dapat memberikan solusi konkret terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah serta meningkatkan kinerja organisasi pemerintah daerah.

Peneliti dapat menggambarkan kerangka model berpikir sebagai berikut berdasarkan kerangka berpikir tersebut:



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran Tentang Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Organisasi

F. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2020), hipotesis adalah perkiraan sementara pada sebuah penelitian yang masih perlu untuk dibuktikan kebenarannya. Ini berarti hipotesis berfungsi sebagai titik awal dalam proses penelitian ilmiah, di mana peneliti merumuskan suatu pernyataan yang bisa diuji secara empiris. Hipotesis membantu dalam memberikan arah penelitian dengan menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih yang akan diuji dalam penelitian. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H_0 : Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
 H_a : Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat

